

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebijakan *21st Century Statecraft* AS menjadi titik awal lahirnya suatu konsep diplomasi baru, yakni *eDiplomacy*. *eDiplomacy* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran, pengumpulan serta analisis informasi untuk tujuan diplomasi, dan kebijakan luar negeri suatu negara (Holmes, 2013). Dari pemaparan di atas, terlihat korelasi yang cukup unik antara media massa dan diplomasi. Untuk menggambarkan pola hubungan kedua variabel tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *eDiplomacy* AS dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba pada masa pemerintahan Barack Obama.

Peran media massa di era kepemimpinan Obama merupakan fenomena yang menarik, karena Obama seringkali menempatkan media massa sebagai *top decision maker* untuk mengkonstruksi wacana publik sesuai arah kebijakan yang diinginkannya (Al-Qahtani, 2011). Penerapan *eDiplomacy* melalui prinsip P2P2G¹ dalam kebijakan luar negeri AS pada era kepemimpinan Obama terbilang sangat sukses. Faktanya, *eDiplomacy* dapat digunakan Presiden Obama dalam mewujudkan kebijakan luar negerinya terlihat dari keberhasilan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba. Sejarah mencatat bahwa kedua negara ini telah memutuskan hubungan diplomatik lebih dari lima dekade lalu (Lamar. Joe & Cochinos, Bahia, D., 2015).

Normalisasi hubungan dengan Kuba menjadi salah satu janji kampanye Obama, sehingga pada tahun 2009 muncullah serangkaian aksi AS untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara tersebut. Obama melaksanakan diplomasi secara masif dengan berpegang pada prinsip bahwa pendekatan lunak dan diplomatik akan mempersuasi Kuba untuk bertindak lebih demokratis. Langkah pertama yang dilakukan Obama adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan

¹ P2P2G adalah singkatan dari *People to People to Government Communication* artinya prinsip diplomasi AS di era *21st Century Statecraft* merupakan kombinasi dari *Government to Government, Government to People, People to People* (Rasiej & Sifry, 2009)

ekonomi dan telekomunikasi yang merupakan rangkaian dari kebijakan *Reaching Out Cuban People*². Selanjutnya, AS juga berusaha mengintegrasikan Kuba ke dalam sistem internasional dan regional dengan mengajak Kuba bergabung di OAS³ (U.S. Department of State, 2014). Upaya-upaya tersebut menurut Obama akan sangat efektif dalam menarik perhatian Kuba. Namun, hal tersebut malah diredifinisikan Kuba menjadi lebih sederhana, yakni anggapan skeptis bahwa AS secara diam-diam ingin mengubah ideologi Kuba dengan cara baru, yakni berupa pendekatan dan strategi negosiasi.

Titik terang normalisasi hubungan diplomatik AS - Kuba dimulai sejak dilakukannya diplomasi rahasia tingkat tinggi, yakni perundingan pemimpin kedua negara selama 18 bulan yang difasilitasi oleh Bapa Paus Fransiskus⁴ (Boorsttein, 2014). Diplomasi diam-diam tersebut berujung pada sambungan telepon Obama dan Castro yang berlangsung selama satu jam, tepat sehari sebelum pengumuman resmi rencana normalisasi yang diumumkan di televisi nasional masing-masing pada tanggal 17 Desember 2014 atau dikenal dengan D17. Peristiwa bersejarah D17 tersebut tidak terlepas dari pengaruh media massa *online* yang cukup signifikan. Beberapa hari sebelum D17, ternyata artikel yang ditulis oleh *The New York Times*, memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Obama dan Castro dalam mengambil keputusan untuk menjalin kembali hubungan baik antar kedua negara tersebut (Sanz & Shorenstein, 2015).

Pasca D17, ternyata hubungan kedua negara masih membeku, namun pada saat inilah peran media menjadi sangat vital. AS mulai menggunakan strategi *eDiplomacy*-nya untuk mencapai normalisasi hubungan kedua negara. Dalam kurun waktu sekitar dua tahun pasca D17, AS menggunakan peran teknologi media secara masif dalam upaya diplomasi publiknya. Hal ini terlihat dari peluncuran

² *Reaching out Cuban People* merupakan serangkaian kebijakan AS dalam menjalin hubungan bilateral yang lebih baik dengan Kuba, seperti pengurangan pembatasan perjalanan, pemudahan pengiriman uang, penyediaan paket perjalanan AS - Kuba dan sebaliknya (White House, 2011).

³ *Organization of American States* (OAS) adalah sebuah organisasi internasional yang bermarkas di Washington, D.C., Amerika Serikat. Anggota-anggota OAS terdiri dari 35 negara merdeka di benua Amerika (OAS, 2014)

⁴ Paus Fransiskus merupakan Paus ke-266 dan satu-satunya paus yang berasal dari Flores, Buenos Aires, Amerika Latin. Beliau melanjutkan ajaran Paus Yohannes Paulus II mengenai diplomasi Vatikan khususnya dalam masalah pemulihan hubungan AS dan Kuba. Sejak awal kepausannya, Paus Fransiskus berambisi untuk mengembalikan peran tokoh agama dalam menciptakan perdamaian dunia (Sheila, et al., 2017).

saluran televisi baru di AS melalui satelit DISH Network yang bernama CUBAMAX TV. Program yang disiarkan AS ini berupa berita olahraga, hiburan, budaya dan pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan negara Kuba di kancah internasional (Gomez, 2016). Selain itu, AS melakukan publikasi melalui saluran Radio dan TV Marti yang berjalan di bawah program *Voice of America* (VOA) yang menayangkan program-program berita di seluruh dunia dengan tujuan untuk memberikan orang-orang Kuba pandangan yang realistis mengenai kehidupan AS, khususnya isu demokrasi dan perdamaian.

Selanjutnya, untuk menarik perhatian publik Kuba, AS melalui USAID⁵ juga membantu membiayai operasi twitter Kuba yang bernama Zunzuneo. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney dan Matt Herrick, mengatakan bahwa proyek ini merupakan kebijakan AS untuk membantu warga Kuba berkomunikasi. Jay Carney juga menyebutkan bahwa berbagai *platform* media sosial akan diperkenalkan kepada masyarakat Kuba, seperti Facebook, Whatsapp, Flickr, Instagram, dll. (BBC News, 2014). Tidak hanya itu, AS melalui *website* resmi *National Democratic Institute* (NDI) dan *International Republican Institute* (IRI) secara aktif menyebarkan isu-isu normalisasi dengan mempublikasikan berbagai *e-book* dan jurnal *online* (The White House, 2014).

Diawali dengan menghadirkan internet di Kuba yang berlanjut pada penerbitan publikasi berita *online*, pelatihan penyensoran dan penggunaan teknologi informasi digital, agenda *internet freedom*, dan kampanye media sosial ternyata sukses dalam mempersuasi pemerintah serta masyarakat Kuba dalam mengubah politik luar negerinya sehingga normalisasi hubungan diplomatik secara penuh terjadi pada Januari 2017 (WTTW, 2017). Berangkat dari hal tersebutlah, maka pemikiran utama dalam penelitian ini adalah bahwa normalisasi hubungan diplomatik AS - Kuba merupakan kesuksesan dari program *eDiplomacy* AS. Adapun normalisasi yang dimaksud adalah pemulihan hubungan diplomatik secara penuh meliputi pembukaan kembali kedutaan besar kedua negara di masing-masing ibu kota, pembukaan kembali lalu lintas perjalanan AS - Kuba, peningkatan akses

⁵ *United States Agency for International Development* (USAID) badan independen dari pemerintahan Amerika yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri AS (USAID, 2018)

Kuba terhadap jaringan komunikasi, pertukaran tahanan, serta penghapusan embargo ekonomi Kuba.

Kebanyakan penelitian yang sudah ada mendasarkan analisisnya pada konsep *faith-based diplomacy*. Sebagai contoh, Ansarullah (2017), Zawatsky (2015), dan Noviyanti (2017) dalam penelitiannya cenderung meneliti normalisasi hubungan kedua negara tersebut dari sudut pandang agama. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan keberhasilan *eDiplomacy* dalam terwujudnya normalisasi hubungan kedua negara melalui konsep *eDiplomacy*. Fenomena tersebut kemudian menjadi isu penting dalam ilmu hubungan internasional kontemporer, karena perkembangan teknologi akan selalu membawa dinamika baru dalam interaksi hubungan internasional, sehingga pembahasan serta langkah-langkah perlu dilakukan supaya dapat beradaptasi serta dapat meneliti implikasi yang terjadi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana *eDiplomacy* AS berpengaruh terhadap kesuksesan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba pada masa pemerintahan Barack Obama?”

I.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep *eDiplomacy* yang merupakan turunan dari konsep diplomasi publik McDonald. Ilmu Hubungan Internasional mengenal adanya suatu konsep *power*, yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai hasil yang diinginkan. Joseph S. Nye, seorang Dekan *Harvard Kennedy School of Government* (2004) merumuskan suatu konsep yang disebut *Soft Power* yang berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai hasil yang diinginkan dan bukan dengan paksaan atau pembayaran, melainkan dengan ketertarikan (Nye, 2004). Kemampuan *soft power* dalam menyusun preferensi tersebut dapat diasosiasikan dengan aset-aset *intangible*, seperti sifat atraktif, budaya, nilai-nilai politik dan institusi, kebijakan sah, serta otoritas moral.

Nye menamakan upaya untuk mempengaruhi ‘pikiran’ dan ‘hati’ pihak lawan yakni dengan upaya kooptif, yakni “... *the ability to shape what others want-can rest on the attractiveness of one’s culture and values or the ability to manipulate the agenda of political choices in a manner that makes others fail to express some preferences because they seem to be unrealistic*” Nye (2004) dalam (Rosyidin, 2018). *Soft power* bukan sekedar permainan kata melainkan bagaimana mempengaruhi persepsi dan preferensi tindakan. Jadi dalam mempengaruhi persepsi dan preferensi tindakan tersebut, *soft power* merupakan instrumen manipulasi pikiran dan keyakinan sehingga pihak yang dimanipulasi secara sukarela menerima ide-ide maupun tindakan kita. Orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki bukan lantaran terpaksa tetapi karena ia memandang positif apa yang kita sampaikan dan lakukan (Rosyidin, 2018).

Berawal dari konsep *soft power* tersebutlah, sehingga muncul istilah diplomasi. Kemudian, dalam perkembangannya diplomasi tersebut melahirkan konsep diplomasi publik. Dalam penelitian ini secara spesifik penulis akan menggunakan konsep diplomasi publik McDonald yang kemudian dikenal sebagai *multitrack diplomacy*. Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan menggunakan *multitrack diplomacy* jalur kesembilan, yaitu komunikasi dan media yang melahirkan konsep *eDiplomacy*. Penempatan media massa menjadi salah satu jalur dalam *multitrack diplomacy* yang membuktikan bahwa komunikasi dan media dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi. Demikian juga dalam buku “*The Sources of American Policy as a Funnel of Causality*” yang dikemukakan oleh Charles Kagley (Kagley, 2006) menempatkan media massa sebagai salah satu sumber yang mampu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya dalam kategori *societal sources* (Permadi, 2012).

I.3.1 Diplomasi Publik McDonald

Kesadaran mengenai munculnya ide “*citizen diplomacy*” atau diplomasi publik muncul dari fakta bahwa keterlibatan publik dalam diplomasi merupakan implikasi bahwa masalah perang dan damai bukan semata-mata tugas aktor-aktor resmi pemerintah (Djelantik, 2007). Diplomasi publik diartikan sebagai usaha resmi dari pemerintah suatu negara untuk membentuk lingkungan komunikasi di luar negeri, dimana kebijakan luar negerinya dijalankan dengan tujuan mengurangi

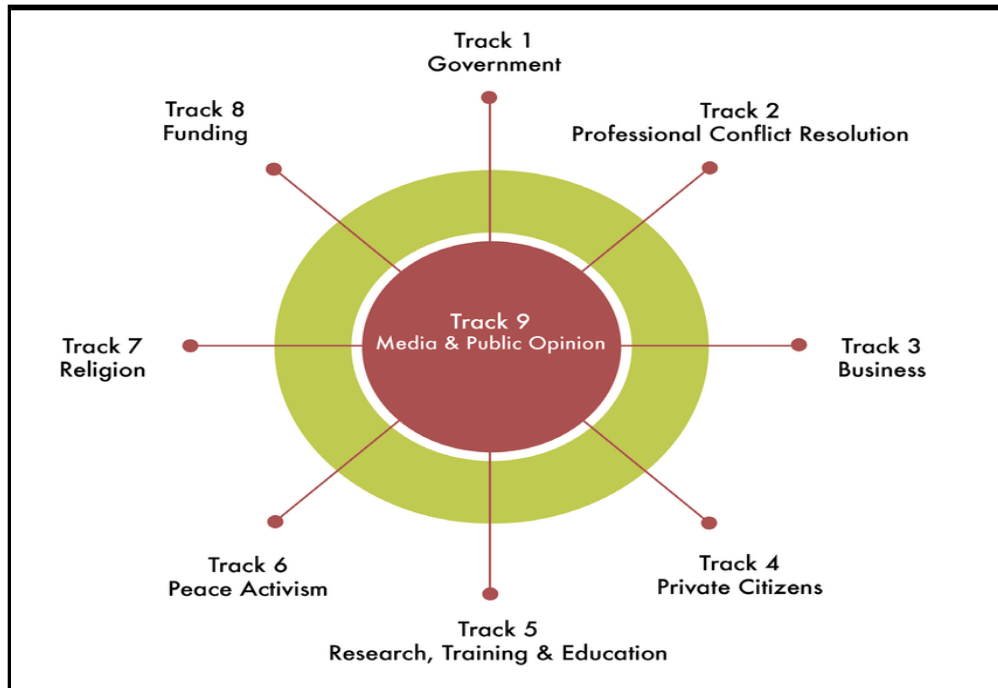
kesalahpahaman dan mispersepsi yang dapat menyulitkan hubungan negaranya dengan negara lain (Tuch, 1990).

Dengan dilakukannya diplomasi publik, masyarakat dapat berperan melalui opininya untuk mendukung kebijakan negaranya serta dapat membantu mempengaruhi opini masyarakat negara-negara lainnya mengenai negaranya (Bound, Kristen, et al, 2007). Dalam artikel *Foreign Policy* tahun 2002, Mark Leonard menjabarkan tiga tujuan diplomasi publik abad 21 yaitu: 1.) meningkatkan rasa keakraban, mengubah *image* atau pandangan masyarakat internasional mengenai suatu negara serta meningkatkan *nation branding* suatu negara di negara lain; 2.) meningkatkan rasa apresiasi dan menciptakan persepsi positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari sudut pandang negara tersebut serta menciptakan *mutual understanding in culture* antara satu negara dengan negara lain; 3.) meningkatkan hubungan dengan suatu negara dengan memunculkan aktor-aktor masyarakat dalam diplomasi publik (Mark Leonard, et al., 2002).

Diplomasi publik dan konsep juga *nation branding* kerap dihubungkan karena keduanya memiliki sejumlah kemiripan terutama dalam kaitannya dengan daya tarik dan pengaruh (*influence*) yang ditargetkan pada objek asing. Mengutip pernyataan Jan Melissen (2005), diplomasi publik dan *nation branding* merupakan dua konsep *sisters under the skin* yang memiliki tujuan umum mempromosikan citra, membangun identitas, budaya, serta nilai-nilai nasional. Kegiatan diplomasi publik dapat berlangsung tanpa adanya *nation branding*, namun kegiatan *nation branding* tidak akan sempurna tanpa diiringi praktik diplomasi public (Melissen, 2005).

Seiring dalam perkembangannya, Diamond dan McDonald mengagas lebih lanjut diplomasi Publik Edmun Gulion dengan melibatkan diplomasi sembilan jalur atau sering dikenal dengan *multitrack diplomacy*. McDonald berpendapat bahwa diplomasi jalur pertama, yakni diplomasi *Government to Government* memiliki banyak keterbatasan karena bergerak dalam kerangka kekuasaan dan interaksi yang kaku. Oleh sebab itu, McDonald mengembangkan konsep diplomasi publik dengan melibatkan aktor non pemerintah (Louis Diamond & John McDonald, 1996).

Gambar I.1 *Multitrack Diplomacy*



Sumber: Institute for Multitrack Diplomacy

Sembilan aktor yang dimaksud oleh Diamond dan McDonald merupakan aktor-aktor non Negara yang terdiri dari kalangan bisnis, kalangan profesional, kaum akademisi, LSM atau organisasi non pemerintah (NGO), perusahaan multinasional (MNC), lembaga keagamaan, lembaga ekonomi dan keuangan, warga biasa, serta media massa. Model diplomasi publik Diamond dan McDonald pada jalur ke sembilan menunjukkan peran dan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh media massa (Heidi Burgess & Guy M. Burgess, 2016). Diamond dan McDonald berasumsi bahwa media massa memiliki fungsi yang strategis, sebab dengan menggunakan media maka semua aktor diplomasi publik dapat menyatu melalui aktivitas komunikasi. Hal ini sangat relevan dengan aktivitas diplomasi saat ini, bahwa tidak ada satupun peristiwa luar negeri yang dilakukan tanpa didahului dengan menganalisis opini publik. Opini publik menjadi elemen mendasar dari diplomasi publik dalam mempengaruhi kebijakan politik luar negeri (Melissen, 2005).

Media massa yang identik dengan publikasi informasi melalui radio, televisi dan internet, merupakan instrumen strategis untuk membentuk opini, baik di level domestik maupun global. Perkembangan informasi dan telekomunikasi telah

menggeser pandangan tradisional tentang “membentuk citra baik” (Brown, 2002). Pemerintahan di dunia tidak dapat lagi berpropoganda untuk memanipulasi realitas. Citra dan realitas tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga untuk memperbaiki citra maka realitas yang terlebih dahulu diperbaiki, selanjutnya media massa akan menjadi komunikator yang mentransformasinya menjadi citra. Diplomasi yang melibatkan media massa dan internet ini kemudian berkembang pesat, sehingga lahirlah *eDiplomacy* sebagai turunan dari diplomasi publik.

I.3.2 *eDiplomacy*

Revolusi Web 2.0 semakin meningkatkan popularitas dari *platform* media sosial, *website* dan aplikasi digital yang memunculkan *eDiplomacy* (Bjola & Holmes, 2015). Seperti yang didefinisikan oleh Hanson, *eDiplomacy* merupakan “*the use of the internet and new information communication technologies to help achieve diplomatic objectives*” (Hanson, 2012). Hal ini merujuk pada penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan diplomatik. Pandangan senada juga diberikan oleh William Assanyo, “*a new diplomacy resulting from the association of ICTs and other electronic tools to conduct diplomatic activities*” (Assanyo, 2012).

Berridge mendefinisikan *eDiplomacy* sebagai proses diplomasi menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi elektronik, atau internet (G.R. Berridge, Lorna. L., Alan J., 2102). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar kepada cara negara dalam melaksanakan komunikasi internasionalnya dengan agen di luar negeri, maupun dengan negara asing, organisasi internasional, dan organisasi non pemerintah. Sementara menurut Departemen Luar Negeri AS, *eDiplomacy* merupakan sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi AS melalui internet (U.S. Department of State, 2003). Bagi AS, *eDiplomacy* dianggap sangat efektif sehingga Departemen Luar Negeri AS membentuk badan khusus yang menangani masalah *eDiplomacy*.

Lebih jauh lagi, *The UK Foreign and Commonwealth Office* mendefinisikan *eDiplomacy* sebagai “*solving foreign policy problems using internet*” (British Embassy Holly See, 2014), yakni mengatasi masalah kebijakan luar negeri

menggunakan internet. Wilson Dizard memberikan pandangan yang lebih tajam dalam tulisannya, “*Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age*” (Dwikardhana, 2017), dengan menyimpulkan tiga peran penting yang dimainkan diplomasi digital di era reformasi, yakni: 1.) memunculkan isu-isu tentang kebijakan luar negeri yang melibatkan sumber informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi canggih; 2.) penggunaan media sosial sebagai sarana pertukaran dan sumber informasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; 3.) lonjakan peranan diplomasi publik khususnya dalam menggunakan teknologi digital dalam mempengaruhi opini publik.

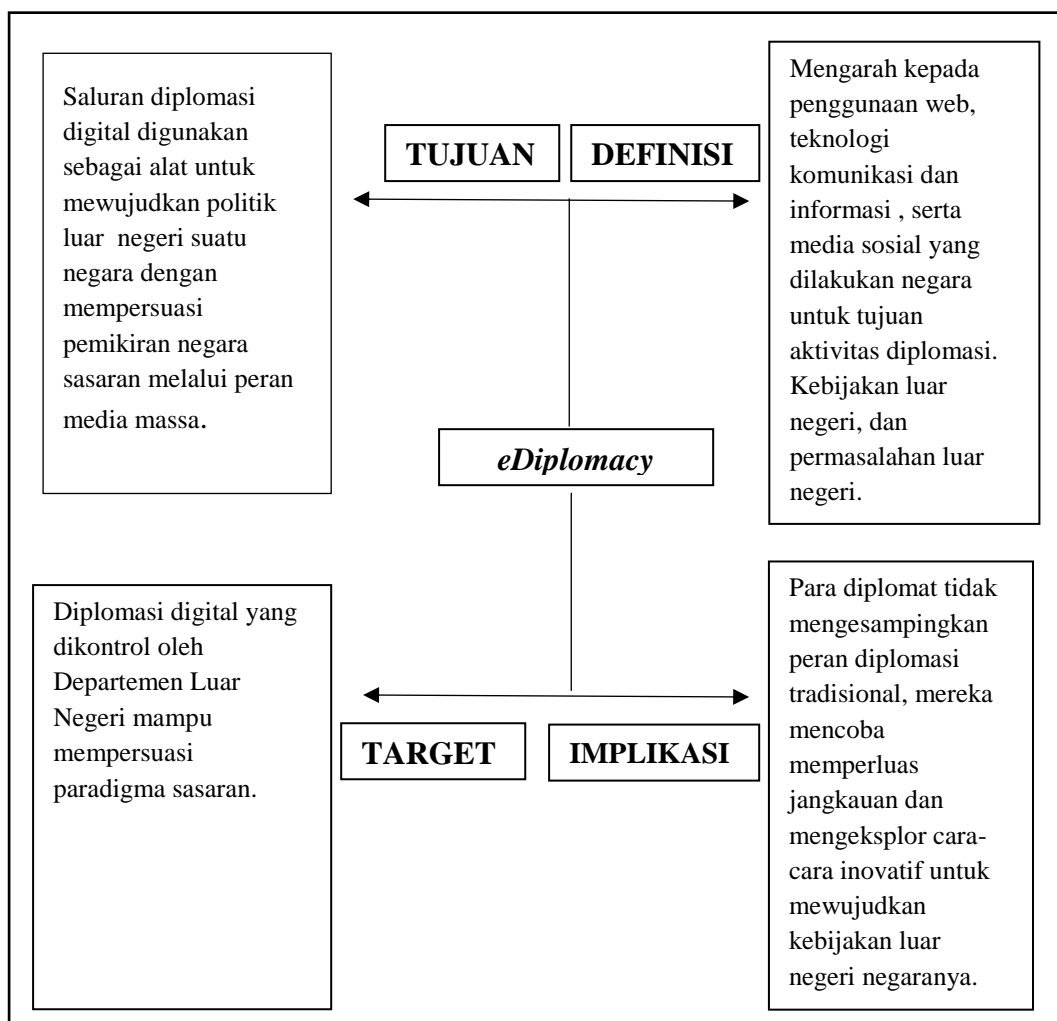
Selain itu, Westcott menjelaskan tiga pengaruh fundamental *eDiplomacy* terhadap hubungan internasional, yakni: 1.) meningkatkan jumlah suara dan minat publik terhadap pembuatan kebijakan luar negeri yang kemudian mengurangi kontrol eksklusif dari negara dalam proses *decision-making*; 2.) mempercepat persebaran informasi tentang segala isu dan kejadian yang kemudian akan mempengaruhi dampak dan penanganan isu tersebut; 3.) memungkinkan layanan diplomatik tradisional disampaikan dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih efisien ke pemerintah dan warga negaranya sendiri, maupun ke pihak asing (Westcott, 2008). Adapun jenis-jenis *platform* yang digunakan dalam *eDiplomacy* ini, antara lain seperti *website*, intranet, wiki, media sosial, dan berbagai media-media *e-learning* (Diplo Foundation, 2015).

Dari definisi-definisi *eDiplomacy* yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *eDiplomacy* atau biasa juga disebut sebagai digital diplomasi, *cyber diplomacy*, *net diplomacy*, *diplomacy 2.0*, dan *21st Century Statecraft* ini merupakan suatu bentuk diplomasi baru yang berbasis TIK untuk tujuan diplomasi suatu negara. Semakin meningkatnya informasi yang menyebar dalam bentuk digital kini memungkinkan Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi lebih intensif dengan cabang pemerintah yang lain dan menggunakan piranti *eDiplomacy* untuk terus melakukan pengawasan dan berperan dalam kebijakan internasional di seluruh bidang pemerintahan.

Menurut Allan Gyngell (2011) seorang pakar Kebijakan Luar Negeri Australia mengatakan ada empat poin utama keunggulan *eDiplomacy*, yakni: 1.) memudahkan pemerintah untuk berkomunikasi dan mempengaruhi masyarakat

secara langsung; 2.) memudahkan pengiriman informasi kepada segmen-segmen pemegang kunci dalam pemerintahan; 3.) kesempatan untuk menggali wawasan dan menambah informasi bagi para diplomat; 4.) sebagai tantangan pemerintah dan individu untuk dapat mengoptimalkan penggunaan pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjadikan *eDiplomacy* sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan kepentingan nasional suatu negara merupakan pilihan yang tepat.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran *eDiplomacy*



Sumber: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSi), 2017

I.4 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori (Gibson, 2004). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis, yakni melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari literatur yang memiliki relevansi dengan inti permasalahan yang akan dibahas dan kemudian melakukan analisis berdasarkan literatur tersebut (Findlay, 2007). Literatur yang dimaksud yaitu berupa buku, artikel jurnal, majalah, koran, serta situs-situs atau laporan yang terdapat di internet yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *process-tracing*, yang artinya peneliti tidak sekedar mencari hubungan sebab-akibat melainkan berfokus pada proses terjadinya sesuatu. Penelitian ini berusaha meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu ‘sebab’ menghasilkan ‘akibat’. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitik, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan secara deskriptif. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik (Sugiyono, 2006).

I. 5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab. Adapun struktur penulisan akan terdiri dari: Bab 1 adalah pendahuluan yang memberikan pemaparan mengenai gambaran umum masalah penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan juga hipotesis terkait dengan rumusan masalah yang diajukan. Bab 2 difokuskan pada dua hal, yakni yang *pertama*, menjelaskan mengenai sejarah hubungan AS - Kuba, serta yang *kedua*, membahas mengenai dinamika *eDiplomacy* AS, bagaimana konsep tersebut berkembang dari awal dan langkah-langkah yang dilakukan oleh AS dalam meningkatkan *eDiplomacy* di pemerintahannya. Bab 3 berisi jawaban atas rumusan masalah dengan memetakan bentuk *eDiplomacy* yang dilakukan AS, melihat respon Kuba terhadap implementasi *eDiplomacy* tersebut

serta pengaruh *eDiplomacy* AS dalam normalisasi hubungan diplomatik AS - Kuba setelah D17. Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini akan mengemukakan temuan penelitian, apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal peneliti atau justru bertentangan. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.